

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan struktur pasar tenaga kerja global akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 telah mendorong banyak negara untuk merancang ulang strategi pengembangan sumber daya manusia, terutama di kalangan usia produktif. Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era digital dan pasca-pandemi, banyak negara mulai mengandalkan program pelatihan kerja berbasis teknologi sebagai strategi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. *Internasional Labor Organization* (ILO, 2020) menekankan pentingnya investasi dalam pelatihan vokasional dan *reskilling* digital guna menghadapi disrupsi teknologi dan mendorong pemulihan ekonomi global yang inklusif. Program pelatihan berbasis digital juga menunjukkan bahwa secara signifikan meningkatkan peluang kerja bagi pencari kerja muda di berbagai negara berkembang, terutama jika disertai dengan sertifikasi kompetensi dan dukungan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi (Cámar et al. 2022). Di Indonesia, salah satu respons kebijakan yang menonjol dalam bidang ini adalah Program Kartu Prakerja. Diluncurkan pada tahun 2020, program ini dirancang sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama pemuda, melalui pelatihan berbasis digital yang fleksibel dan mudah diakses. Jawa Barat juga tercatat sebagai provinsi dengan jumlah peserta Program Kartu Prakerja tertinggi di Indonesia sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020. Program ini menjadi penting dalam konteks Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pengangguran usia muda, di mana transisi dari pendidikan ke dunia kerja masih penuh hambatan (*World Bank*, 2021).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat partisipasi tertinggi dalam Program Kartu Prakerja di Indonesia. Berdasarkan laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (2024) dan data Statistik Prakerja (2024), tercatat sebanyak 3,2 juta orang dari angkatan kerja di Provinsi

Jawa Barat telah mengikuti pelatihan melalui Program Kartu Prakerja sejak peluncurannya pada tahun 2020 hingga 2024. Tingginya tingkat partisipasi ini mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat Jawa Barat dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing kerja melalui program pelatihan berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam upaya menurunkan angka pengangguran pemuda, khususnya di wilayah dengan permasalahan ketenagakerjaan yang relatif kompleks seperti Jawa Barat.

Tabel 1.1 10 Provinsi Jumlah Penerima Prakerja terbanyak Tahun 2024

No.	Provinsi	Jumlah Penerima
1	Jawa Barat	3,2 Juta Orang
2	Jawa Timur	2,09 Juta Orang
3	Jawa Tengah	1,80 Juta Orang
4	DKI Jakarta	1,27 Juta Orang
5	Banten	936,36 Ribu Orang
6	Sulawesi Selatan	672,04 Ribu Orang
7	Sumatera Selatan	602,95 Ribu Orang
8	Lampung	597,71 Ribu Orang
9	Sumatera Barat	509,98 Ribu Orang
10	Sumatera Utara	506,65 Ribu Orang

Sumber: Statistik Prakerja, 2024

Pada tabel 1.1 diatas bisa dilihat tingginya partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam Program Kartu Prakerja dan beragamnya jenis pelatihan yang tersedia, provinsi ini menjadi lokasi yang strategis untuk mengevaluasi efektivitas program dalam mengurangi pengangguran pemuda. Analisis lebih lanjut dapat difokuskan pada dampak spesifik dari pelatihan-pelatihan tersebut terhadap peningkatan keterampilan dan peluang kerja bagi pemuda di wilayah ini.



Gambar 1.1 Tren Penerimaan Prakerja di Provinsi Jawa Barat (2020-2024)
 Sumber: Statistik Prakerja, 2024

Berdasarkan data tren penerima Program Kartu Prakerja, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah peserta sejak tahun 2022, dari hanya 326 ribu pada 2021 menjadi lebih dari 2,5 juta pada 2022, dan terus meningkat hingga mencapai 3,2 juta pada 2024. Lonjakan ini mencerminkan perluasan skala program dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas Prakerja sebagai solusi peningkatan keterampilan. Namun, partisipasi yang tinggi tersebut perlu diimbangi dengan evaluasi empiris untuk memastikan bahwa program benar-benar berdampak pada peningkatan status ketenagakerjaan pemuda, khususnya di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi seperti Jawa Barat.

Pengangguran pemuda merupakan isu serius di banyak negara, ditandai tingkat pengangguran kaum muda yang konsisten lebih tinggi daripada kelompok usia lainnya. Secara umum, penurunan tingkat pengangguran pemuda menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek sosial dan ekonomi suatu negara. Pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, dan mengurangi beban demografis. Partisipasi pemuda dalam pasar kerja juga berkaitan dengan berbagai hasil positif, seperti peningkatan pendapatan rumah tangga, stabilitas sosial, dan pengurangan ketimpangan (ILO, 2020). Pengangguran kaum muda sangat dipengaruhi oleh tantangan struktural seperti terbatasnya akses terhadap pelatihan kejuruan yang relevan, ketidaksesuaian keterampilan yang meluas, dan meningkatnya persaingan

dalam lingkungan teknologi yang berkembang pesat. Faktor-faktor ini secara signifikan menghambat integrasi pekerja muda ke dalam pasar tenaga kerja (Thisse & Zenou, 2000).

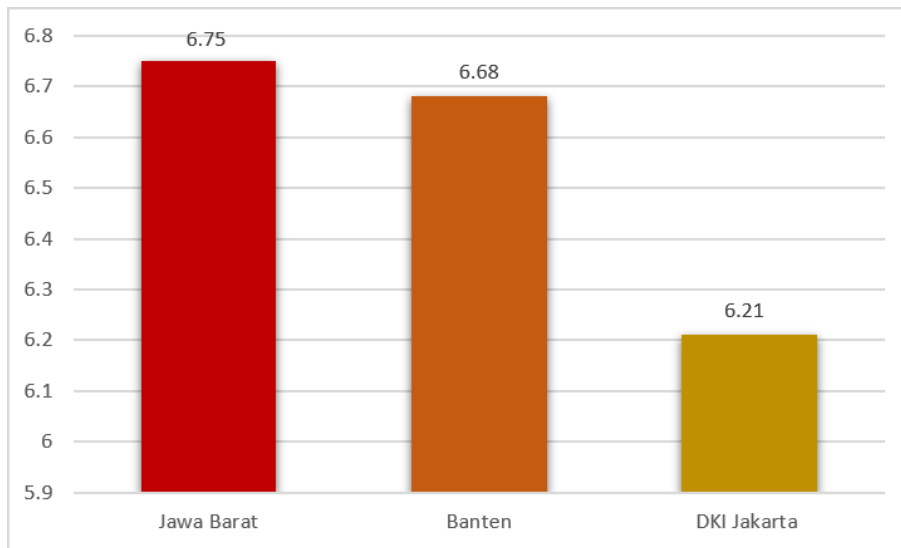
Di Indonesia, permasalahan pengangguran pemuda juga menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kelompok usia muda (15–24 tahun) mencapai 17,32%, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Artinya, dari setiap 100 pemuda dalam angkatan kerja, sekitar 17 di antaranya tidak memiliki pekerjaan, meskipun sedang aktif mencari kerja dan tersedia untuk bekerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemuda masih menghadapi hambatan besar dalam proses transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Rasio TPT pemuda terhadap TPT dewasa tercatat sebesar 6,34 kali lipat, yang menegaskan bahwa pemuda memiliki kerentanan pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa. Ketimpangan ini mengindikasikan kurang optimalnya sistem pendidikan dan pelatihan kerja dalam membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Lebih lanjut, distribusi pengangguran pemuda juga menunjukkan perbedaan mencolok antara wilayah. TPT pemuda di wilayah perkotaan mencapai 19,86%, sedangkan di pedesaan hanya 13,85%. Ini menggambarkan bahwa tantangan pengangguran pemuda cenderung lebih berat di wilayah kota, di mana persaingan kerja lebih tinggi dan tekanan ekonomi lebih kuat. Selain itu, lebih dari separuh penganggur nasional (52,64%) merupakan pemuda, yang menegaskan bahwa kelompok usia muda merupakan penyumbang terbesar terhadap angka pengangguran nasional.



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia
Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan sejumlah studi literatur, tingginya angka pengangguran usia muda di Indonesia disebabkan oleh beragam faktor. Sebuah studi oleh Herawatie et al., (2024) menyoroti bahwa pengangguran di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan sosial yang signifikan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tingkat pendidikan berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran. Dampaknya meliputi penurunan pendapatan, meningkatnya kemiskinan, dan risiko kejahatan. Solusi yang diusulkan mencakup kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menyediakan pelatihan keterampilan dan bantuan sosial. Tingkat pengangguran usia muda di Indonesia mencapai sekitar 16,3% dari total populasi muda sekitar 44 juta orang. Tingginya angka ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan pangan dan stabilitas sosial di Indonesia, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini (Padillah & Saputra, 2024)

Di antara berbagai provinsi di Indonesia, Jawa Barat masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi, terutama di kalangan usia muda.



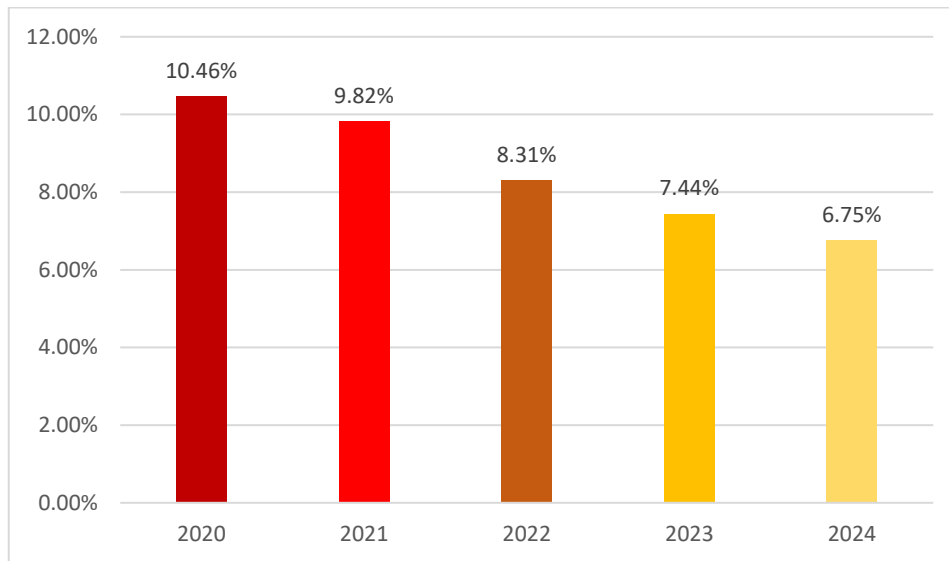
Gambar 1.3 Perbandingan TPT dengan Provinsi Lain

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan visualisasi perbandingan TPT dengan provinsi lain, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 6,75%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten (6,68%) dan DKI Jakarta (6,21%), (BPS, 2024). Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari enam dari setiap seratus angkatan kerja di Jawa Barat belum terserap dalam lapangan pekerjaan.

Tingginya tingkat pengangguran tersebut tidak terlepas dari besarnya konsentrasi penduduk usia kerja di Jawa Barat serta tantangan struktural yang dihadapi oleh kelompok usia muda (15–24 tahun). Banyak pemuda mengalami *skills mismatch*, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri. Selain itu, persaingan kerja yang sangat ketat di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga metropolitan, seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor, turut memperburuk kondisi penyerapan tenaga kerja muda di provinsi ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 6,75%, yang berarti lebih tinggi sekitar 1,84% dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 4,91%. Perbedaan ini menandakan bahwa Jawa Barat menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang lebih serius dibanding provinsi lainnya, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja usia muda, meskipun wilayah ini memiliki banyak pusat pendidikan dan industri.



Gambar 1.4 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat (2020-2024)

Sumber: Bappenas, 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren penurunan yang konsisten. TPT yang sempat melonjak hingga 10,46% pada tahun 2020, akibat dampak pandemi COVID-19, berhasil ditekan hingga mencapai 6,75% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pemulihan pasar kerja yang cukup signifikan, meskipun Jawa Barat tetap menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

Penelitian oleh Alatas et al., (2021) menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja mampu meningkatkan kompetensi kerja peserta sebesar 2,2 persen melalui pelatihan berbasis digital. Temuan serupa dikemukakan Fasri et al., (2023) pada Studi Kasus Kartu Prakerja di Makassar menemukan bahwa program ini berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi digital yang diakui, membantu pemuda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Secara lebih luas, Chakravarty et al., (2019) juga menemukan bahwa program pelatihan kerja memiliki dampak positif moderat terhadap peningkatan kesempatan kerja, terutama bila disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Sebaliknya hasil berbeda ditemukan oleh Anggara, (2024) menunjukkan bahwa meskipun Program Kartu Prakerja mampu meningkatkan

penghasilan peserta muda, dampaknya terhadap retensi kerja belum signifikan secara statistik, terutama dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi program, khususnya dalam penyelarasan pelatihan dengan kebutuhan riil pasar kerja di tingkat daerah seperti Jawa Barat. Pandangan serupa juga disampaikan oleh ILO, (2020) yang menekankan bahwa pelatihan digital semata tidak cukup efektif jika tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru atau reformasi sistem ketenagakerjaan. Kedua temuan ini menyoroti bahwa pelatihan perlu terintegrasi dengan strategi ekonomi yang lebih luas agar benar-benar berdampak pada penurunan pengangguran secara berkelanjutan.

Kondisi ini memperkuat urgensi dilaksanakannya intervensi kebijakan yang bersifat afirmatif dan adaptif terhadap kebutuhan pemuda. Dalam hal ini, Program Kartu Prakerja hadir sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja muda. Program ini memfasilitasi pelatihan daring yang disesuaikan dengan kebutuhan industri serta memberikan insentif yang memungkinkan pemuda dari berbagai latar belakang sosial ekonomi untuk ikut serta. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk muda terbanyak dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, menjadi wilayah strategis untuk mengkaji efektivitas program ini dalam menurunkan pengangguran pemuda.

Penelitian terkait efektivitas program pelatihan kerja telah banyak dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional, namun belum banyak ditemukan kajian serupa di Indonesia yang secara khusus menggunakan pendekatan evaluatif terhadap Program Kartu Prakerja dalam konteks pengangguran pemuda di tingkat provinsi, khususnya Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan pendekatan evaluatif berbasis data mikro untuk mengisi celah dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya masih bersifat deskriptif dan belum secara langsung mengukur dampak program terhadap status ketenagakerjaan pemuda. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada peningkatan kompetensi atau pendapatan peserta, tetapi belum secara komprehensif mengaitkan program ini dengan penurunan angka pengangguran pemuda secara nyata. Selain itu, terdapat perbedaan hasil antara penelitian yang menunjukkan dampak positif pelatihan

terhadap peluang kerja, dan yang menyatakan bahwa retensi kerja tetap rendah pasca pelatihan, meskipun penghasilan meningkat. Perbedaan ini menandakan perlunya analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi sejauh mana program pelatihan seperti Kartu Prakerja benar-benar efektif menurunkan pengangguran, khususnya di wilayah dengan angka pengangguran tinggi seperti Jawa Barat.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan pelatihan kerja yang lebih kontekstual, responsif terhadap kebutuhan pasar kerja lokal, serta efektif dalam mengurangi pengangguran pemuda. Jika program ini terbukti memberikan dampak positif, maka keberhasilannya di Jawa Barat dapat menjadi model atau referensi untuk provinsi lain dengan karakteristik serupa. Meskipun penelitian ini berfokus pada pengurangan pengangguran pemuda sebagai tujuan kebijakan, pengukuran dampaknya dilakukan pada tingkat individu menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2023. Melalui pendekatan *Propensity Score Matching*, penelitian ini mengevaluasi apakah pemuda yang mengikuti Program Kartu Prakerja memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti, dengan karakteristik yang serupa. Oleh karena itu, pengertian “pengangguran” dalam penelitian ini merujuk pada status ketenagakerjaan individu, bukan pada perubahan angka agregat pengangguran provinsi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi indikator awal mengenai kontribusi program terhadap tujuan makro pengurangan pengangguran pemuda di Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari permasalahan dan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi hubungan antara Program Kartu Prakerja terhadap pengangguran pemuda?
2. Bagaimana pengaruh Program Kartu Prakerja terhadap tingkat pengangguran pemuda, dengan membandingkan antara kelompok yang mengikuti dan yang tidak mengikuti program di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara Program Kartu Prakerja terhadap pengangguran pemuda?
2. Menganalisis pengaruh Program Kartu Prakerja terhadap tingkat pengangguran pemuda dengan membandingkan kelompok yang mengikuti dan yang tidak mengikuti program di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang diharapkan:

a. Manfaat untuk Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam menganalisis kebijakan ketenagakerjaan berbasis data, serta mengembangkan kemampuan metodologis khususnya dalam penggunaan metode *Propensity Score Matching*.

b. Manfaat kepada Pihak Lain

Temuan penelitian ini dengan harapan menjadi dasar pertimbangan untuk instansi pemerintah dalam evaluasi kebijakan mengurangi pengangguran pemuda. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu ketenagakerjaan dan kebijakan pelatihan kerja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, analisis difokuskan di Provinsi Jawa Barat dengan memanfaatkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2023, Dalam penelitian ini, “pemuda” didefinisikan sebagai individu berusia 18 hingga 35 tahun sesuai dengan rentang usia produktif yang relevan dalam konteks ketenagakerjaan, untuk mengkaji apakah terdapat dampak Program Kartu Prakerja dalam mengurangi pengangguran pemuda di Jawa Barat.

1.6 Sistematika Penulis

Untuk memudahkan penyusunan dan pembatasan masalah maka penelitian ini disusun secara sistematis, Sistem Penulisan penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 berisi uraian mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian, manfaat dari hasil penelitian bagi berbagai pihak, ruang lingkup penelitian untuk membatasi cakupan pembahasan, serta sistematika penulisan sebagai panduan isi dari masing-masing bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan teori. Bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran konseptual serta hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu *Propensity Score Matching* (PSM).

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menyajikan hasil dari analisis data yang telah dilakukan. Di dalamnya dijelaskan karakteristik responden, hasil estimasi dampak program, serta pembahasan mengenai temuan yang diperoleh dan keterkaitannya dengan teori maupun hasil studi sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 memuat simpulan dari hasil penelitian berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, serta memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam perbaikan kebijakan dan penelitian selanjutnya.